



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Rawas tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2020. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 sebagai penjabaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi Musi Rawas yaitu :“ **MURA SEMPURNA 2021**”.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi ke-7 yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi ke-7 Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi adalah :

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu strategi yang ditempuh adalah :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.



6. Meningkatkan Inovasi layanan Perizinan Online.

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi padaseluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayananperizinan;
3. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruhproduk hukum daerah yang berkaitan denganpelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknispelaksanaannya;
4. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraanpelayanan perizinan;
5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepatdan tepat;
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.
7. Membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan perizinan online untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam melayani setulus hati

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2020:

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 – 2025
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom
7. Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk:

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kab Musi Rawas.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi Kinerja Tahunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi daerah sekarang dalam konstelasi regional dan Nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renstra PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018, mengacu pada APBD tahun 2018 sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, ,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan PP No 6 tahun 2008. Jenis indicator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing PD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandungkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan , penjeakan mengenai alas an proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan dan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD

3.3. Program dan Kebijakan

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terawas Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran tahunan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan prediksi tahun 2020.

Anggaran tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 3.993.000.000,- dengan 7 program dan 40 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.937.635.350,- per Desember 2019 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,61% yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari alokasi anggaran sebesar Rp. **1.365.180.000** terealisasi sebesar Rp. **1.348.685.757** atau 98%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari alokasi anggaran sebesar Rp. **654.000.000** terealisasi **649.983.022** sebesar Rp. atau 99%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari alokasi anggaran sebesar Rp. **298.000.000** terealisasi sebesar Rp. **273.297.086** atau 97%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari alokasi anggaran sebesar Rp. **70.820.000** terealisasi sebesar Rp. **70.549.174** atau 99%
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi dari alokasi anggaran sebesar Rp. **888.000.000** terealisasi sebesar Rp. **884.650.784** atau 99%.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dari alokasi anggaran sebesar Rp. **647.000.000** terealisasi sebesar Rp. **640.649.527** atau 99%
7. Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar Rp. **70.000.000** terealisasi sebesar Rp. **69.820.000** atau 99,74%



Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2020 dengan usulan sebesar Rp 3.973.000.000,- terurai dalam 8 program dengan 39 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi fisik maupun keuangan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Adanya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik yang merujuk pada Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadikan pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi sehingga perlu adanya pengadaan jaringan aplikasi system perizinan online dan sarana yang mendukung lainnya.
- c. Pembutan peta investasi sebagai data investasi di kabupaten Musi Rawas yang masih perlu dikembangkan.
- d. Belum memadainya sarana penunjang dalam meninjau lokasi perusahaan yang akan membuat ijin lokasi.
- e. Masih adanya keterlambatan dalam pengumpulan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- f. Masih kurangnya koordinasi antar pihak terkait.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin usaha maupun izin lainnya secara legal.



Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 yang mengatur Pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah maka kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas diukur dengan indicator sebagai berikut :

1. Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP

Capaian Kinerja tersebut disesuaikan dengan Misi ke-7 Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi .

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Nilai Capaian secara umum adalah baik, hal tersebut disebabkan di setiap tahapan sebagian rencana terealisasi dengan baik.

Dalam sasaran kebijakan dan program yang berkualitas dengan pelaksanaan seluruh kegiatan nilai capaian kinerjanya 99% per desember 2018 secara umum sasaran telah tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan karena anggaran yang tersedia tersebut terpenuhi secara optimal dan rencana kerja terealisasi dengan baik. Untuk Tahun berikutnya akan ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta keberdayaan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan yang akan di tempuh.



Adapun isu strategis yang mempengaruhi pencapaian IKU DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni persentase kenaikan Investasi PMDN dan PMA berupa :

a. Meningkatnya Produk hukum yang mendukung Investasi dipengaruhi oleh faktor :

a) Adanya kajian kebijakan Penanaman Modal yang mendukung Investasi :

- Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
 - Tersedianya Kajian Naskah Akademik RUPM
 - Tersedianya Dokumen RUPM
- Tersedianya Perbub atau Perda tentang Penanaman Modal
- Tersedianya Perbub atau Perda tentang Izin berinvestasi

b) Evaluasi reguasi perizinan yang berpihak pada investor

b. Adanya minat Investor berinvestasi :

- Ketersediaan potensi daerah
 - Tersediannya kajian potensi daerah
 1. Tersedianya informasi potensi daerah yang potensial
 - Tersedianya SIPID (sistem informasi potensi investasi Daerah) online
 2. Tersediannya Potensi wisata Musi Rawas
 - Tersediannya pendataan Potensi wisata Musi Rawas
 - Tersedianya Wisata Unggulan Musi Rawas
 3. Tersediannya Potensi Perkebunan
 - Tersediannya lahan potensial perkebunan untuk di investasi
 - Tersedianya Perkebunan yang potensial
 4. Tersediannya Produk Unggulan
 - Tersediannya Pendataan Produk unggulan
 - Tersedianya Produk Khas Musi Rawas
 5. Tersediannya Potensi Pertanian
 - Tersediannya Pendataan Produk Hasil Pertanian
 - Tersedianya Produk Unggulan Pertanian
 6. Tersediannya Potensi Perikanan
 - Tersediannya Pendataan potensi perikanan



- Tersedianya produk olahan dari ikan
- 7. Tersediannya Potensi Peternakan
 - Tersediannya Pendataan hasil ternak unggulan
 - Terpenuhinya kebutuhan ternak di musirawas
- Tersedianya Profil Investasi Daerah
 - 1. Tersedianya data investasi daerah
 - 2. Tersedianya buku profil investasi
- Tersedianya Selayang Pandang Daerah
 - 1. Tersedianya pendataan Selayang Pandang Daerah
 - 2. Tersedianya buku Selayang Pandang Daerah
- Ketersediaan Infrastruktur Daerah
- Ketersediaan Publikasi Promosi
 - Terselenggaranya pameran investasi
 - Tersedianya layanan Promosi Daerah melalui media
 - 1. Tersedianya Promosi investasi melalui media sosial
 - 2. Tersedianya Promosi investasi melalui media massa
 - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Promosi Investasi
 - 1. Tersedianya Gedung Mall Layanan Publik
 - 2. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Layak
 - Tersedianya Filing Kabinet
 - Tersedianya Lemari Pajangan
 - Tersedianya Rak Buku
 - Tersedianya Lemari Etalase
 - Tersedianya Kursi Tamu
 - Tersedianya SopaTamu
 - Tersedianya Kursi Tunggu
- 3. Tersedianya Sarana dan prasarana Wisata yang menarik untuk di Kunjungi
- 4. Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi



- c. Adanya daya saing Daerah :
- Meningkatnya Kajian Kebijakan Penanaman Modal yang Mendukung Investasi
 - Ketersediaan Infrastruktur Daerah
 - Meningkatnya kualitas SDM
- d. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam berinvestasi
- Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal
 - Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usahal
 - Ketersediaan Layanan penanganan permasalahan pengaduan masyarakat
 - Ketersediaan Ruang Layanan pengaduan publik
 - Ketersediaan Prosedur Layananan Pengaduaan
 - Ketersediaan TIM Layananan Pengaduaan
 - Ketersediaan Layananan Penyelesaian Komplik Masyarakat Bersama
- e. Meningkatnya kemudahan layanan perizinan berinvestasi
- Tersedianya SDM yang berkompeten
 - Ketersediaan Pegawai yang terlati dalam Pelayanan
 - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat PTSP
 - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat OSS
 - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat SICANTIK CLOUD
 - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Promosi
 - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat sistem pelayanan Informasi Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
 - Ketersediaan Pegawai yang Mengikuti Diklat Penanaman Modal
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung layanan investasi
 - Tersedianya Lokasi Gedung yang Mudah
 - Tersedianya Akses Jalan Yang Mudah dilalui
 - Tersedianya jalur layanan yang rama bagi kaum Dissabilitas
 - Tersedianya Ruang layanan
 - Tersedianya Ruang Konsultasi Pelaku Usaha
 - Tersedianya Ruang Pelayanan



- Tersedianya Ruang Laktasi
- Tersedianya WC Tamu
- Tersedianya regulasi pelayanan yang memudahkan investasi
 - Tersedianya SOP
 - Tersedianya Standar Pelayanan
 - Tersedianya Maklumat Pelayanan
 - Tersedianya Alur Pelayanan
 - Tersedianya Perbub/Perda tentang Perizinan Online
 - Tersedianya Perbub/Perda tentang e- signature
 - Tersedianya Perbub/Perda tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Tersedianya penerapan informasi teknologi (perizinan investasi secara online)
 1. Tersedianya Hardware
 - Tersedianya Jaringan telekomunikasi Internet
 - Tersedianya Komputer PC
 - Tersedianya Laktop
 - Tersedianya Genset
 - Tersedianya Barcode
 - Tersedianya Printer
 - Tersedianya Scanner
 2. Tersedianya Software
 - Tersedianya Aplikasi Perizinan Online
 - Tersedianya Aplikasi OSS(Online Single Submissoin)
 - Tersedianya Aplikasi SiCANTIK CLOUD
 - Tersedianya Aplikasi Inovasi Perizinan Online
 - Tersedianya Aplikasi SMS Gatewey
 - Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat
 - Tersedianya Aplikasi Kadaluarsa Izin
 - Tersedianya Aplikasi E- Digital Arsip Perizinan
 - Tersedianya Layanan Pojok Online pendampingan pelaku usaha



3. Tersedianya maintenance

- Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
- Tersedianya Upgrading Website yang terintegrasi dengan Aplikasi Perizinan

Berdasarkan Isu Strategis tersebut yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni :

a. Potensi Lingkungan Internal

1. Landasan Hukum Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
2. Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
3. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan yang cepat, tepat dan berkualitas.
4. Jumlah aparatur SDM aparatur yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
5. Tersedianyanya Sarana dan Prasarana kerja
6. Tersedianya Aplikasi Online Perizinan berupa OSS dan Sicantik CLOUD
7. Tersedianya layanan Inovasi Perizinan Online

b. Permasalahan Lingkungan Internal

1. Kompetensi dan kualitas SDA masih terbatas
2. Prasarana gedung kantor masih kurang memadai
3. Sarana dan prasarana yang mendukung Perizinan Online masih terbatas
4. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja.

c. Potensi Lingkungan Eksternal

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Tuntutan reformasi birokrasi pelayanan public agar dapat memberikan pelayanan cepat mudah dan terukur.
3. Harmonisasi antar OPD terkait dalam mendukung penyajian data potensi Daerah dan produk unggulan Musi Rawas

d. Permasalahan Lingkungan Eksternal

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan Online OSS dan Sicantik CLOUD dengan mengintegrasikan dalam website DPMPTSP sehingga memudahkan dalam pelayanan perizinan Online
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 99% di tahun 2018 dengan penilaian yang dinilai baik akan tetapi hal tersebut tak luput dari adanya kelemahan dan masalah yang dihadapi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Adapun analisis lingkungan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Musi Rawas:



1. Kekuatan (Strenght)

- a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Musi Rawas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang termuat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2016, sehingga terdapat kepastian hukum, efektivitas dan pendekatan pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan dan penanaman modal
- b. Hal tersebut di atas dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu kabupaten Mura sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya
- c. Koordinasi yang belum optimal antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dengan dinas / instansi yang terkait.

3. Peluang (Oportunity)

- a. Kesadaran SDM yang ada untuk terus meningkatkan kualitasnya dengan ikut serta dalam pendidikan formal yang lebih tinggi.
- b. Kesadaran SDM yang ada untuk ikut serta menjaga dan merawat serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Terjalinnnya tali silaturahmi antara instansi dalam

4. Tantangan (Threats)

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan tentang legalitas izin usaha.
- b. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam mengumpulkan LKPM.

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja diupayakan strategi pemecahaannya yaitu sebagai berikut :



1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu melalui pendidikan dan pelatihan
2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana sehingga memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya diupayakan beberapa strategi antara lain:
 - a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja;
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah tersedia;
3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dengan instansi terkait diupayakan strategi yakni menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam legalitas usaha dilakukan sosialisasi dalam perizinan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2020, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ada beberapa kebijakan nasional yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun tujuan, sasaran dan program kegiatan. Untuk program yg ada di dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dengan kebijakan nasional terdapat :

- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Penyiapan potensi Sumber daya sarana dan prasarana daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perludilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkanpermasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yangdiformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapatdilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal :

1. Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA
2. Meningkatnya Layanan perizinan prima Meningkatnya Promosi dan peluang investasi.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

4. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instasi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan Organisasi Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah bidang penanaman modal dan perizinan

Sejalan dengan visi Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 yaitu ‘Mewujudkan Musi Rawas Sejahtera Mandiri Produktif Unggul Religius Nyaman Aman (SEMPURNA)’ dan sesuai dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “ **MURA SEMPURNA 2021**”. Dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 terdiri dari :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Penyiapan Potensi sumberdaya,sarana dan prasarana Daerah

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran renja ini.



BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community base development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (stakeholders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar – benar dikedepankan.

Out put rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas adalah program tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Rencana kerja (renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.



Renja juga memberikan Umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Muara Beliti, 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS

YUDI FACHRIANSYAH,AP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197606131996031005



